

STUDI ROMA 13:1-7: KETAATAN KEPADA PEMERINTAH SEBAGAI WUJUD KESADARAN MORAL

HENDI

ABSTRAK

Saat ini, demokrasi di Indonesia sedang dalam keadaan bahaya karena ada upaya dari para elite politik untuk memasung kedaulatan rakyat. Mereka mengabaikan tanggung jawab moral kepada rakyat. Demokrasi yang dikuasai para elite politik yang demikian akan melahirkan pemerintah yang hanya memikirkan kelompok tertentu bukan rakyat banyak. Studi Roma 13:1-7 dengan pendekatan analisis *colon* mengajarkan bahwa ketaatan merupakan suatu wujud tanggung jawab moral yang tinggi kepada Allah selain kesadaran akan adanya murka Allah. Ketaatan itu harus dimiliki oleh para elite politik sebagai bagian dari warga negara (dalam hal ini ketaatan kepada pemerintah). Ketaatan kepada pemerintah dari setiap elite politik menunjukkan tanggung jawab moral yang baik. Jika demokrasi dikuasai oleh orang demikian, kehidupan demokrasi di Indonesia akan sehat dan menyejahterakan rakyat.

Kata-kata kunci: ketaatan, pemerintah, *colon*, transformasi, tanggung jawab, kesadaran, moral

At this time democracy in Indonesia is threatened due to the aims and efforts of the political elite to manipulate the public into deference to those in authority. The political elite ignore their moral responsibility to the public. Democracy in Indonesia, controlled by these elite political figures, only has the interests of selected groups in mind and not the broader public's wellbeing. A text-linguistic analysis of Romans 13:1-7 teaches that obedience is an important moral responsibility before God and includes the realization that God's anger is directed towards those that do not understand this moral responsibility. This obedience, before God, is also the responsibility of the political elite as an expression of their own responsibility as citizens (they too must be obedient to ordained government institutions). Obedience to the government, for these political

elite figures, is an expression of proper moral responsibility. If democracy in Indonesia can be implemented by politicians that understand and express this moral responsibility in the public sphere then democracy in Indonesia will be healthy and the public will prosper.

Keywords: obedience, government, text-linguistic analysis, transformation, responsibility, moral awakening

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini di Indonesia terjadi berbagai peristiwa politik yang menyita perhatian masyarakat luas. Mulai dari kontroversi UU MD3 (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), sengketa pemilu presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK), sampai yang terkini tentang Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah (RUU Pilkada) melalui DPRD. Banyak pihak menilai peristiwa-peristiwa politik itu terjadi karena kekalahan salah satu calon pasangan presiden dan wakil presiden yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) pada pilpres. Ikrar Nusa Bhakti di dalam esainya, “Demokrasi di Ujung Tanduk,” menulis,

Tanda-tanda bahwa kita dapat menuju pada lingkaran setan yang baru dari demokrasi menuju sistem otoriter sudah mulai tampak. Contoh dari perubahan ini adalah tidak legawanya pemimpin dan para pengikutnya yang kalah dalam pemilu presiden langsung 2014. Dengan berbagai cara, mereka berupaya membatalkan kemenangan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla.¹

Sebagian elite politik ternyata belum dapat menerima kekalahan dan hal ini, menurut Bhakti, mereka juga tidak dapat menerima *democratic bargaining* yang ditentukan oleh suara rakyat.²

Saat ini, demokrasi sedang dalam keadaan bahaya karena ada upaya dari pihak parlemen untuk memasung kedaulatan rakyat dan menghambat program-program pemerintah yang terpilih melalui pembuatan sejumlah undang-undang. Kekuatan yang kalah ini berupaya menguasai semua posisi strategis di DPR melalui revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 mengenai MD3. UU MD3 ini jelas sarat agenda politik yang hanya menguntungkan golongan

¹*Kompas* 10 September 2014.

²Ibid.

atau pihak tertentu dan bukan rakyat sehingga, tidak heran, berbagai pihak langsung menggugat undang-undang ini ke MK.³

RUU Pilkada juga menjadi ajang arogansi elite politik (KMP) untuk menguasai sejumlah pemerintah di daerah pascakekalahan di tingkat nasional dengan cara merampas daulat rakyat. Penolakan RUU ini datang dari berbagai pihak dan meluas di berbagai daerah. Sri Palupi menyatakan bahwa keputusan KMP untuk mengembalikan pilkada kepada DPRD tak terlepas dari pertarungan pilpres. Mereka menyadari telah dikalahkan oleh rakyat dan kini mereka hendak menghukum rakyat dengan mencabut kedaulatannya.⁴

Bhakti mengajak agar kita tidak tinggal diam atas praktik elite politik di parlemen yang semakin menjauh dari asas demokrasi. Jika hal ini kita diamkan, bukan hanya pilkada langsung yang mereka tiadakan, melainkan, lebih buruk lagi, mereka akan mengamendemen konstitusi negara dan mengembalikan pemilihan presiden oleh MPR dan bukan langsung oleh rakyat. Tanpa perjuangan kita bersama, demokrasi kita benar-benar akan dikuasai oleh kaum penjahat.⁵ Demokrasi yang dikuasai elite politik yang tidak memiliki hati nurani dan tanggung jawab moral akan menghambat kemajuan bangsa karena pemerintah yang terbentuk hanya akan memikirkan kelompok atau golongan tertentu bukan rakyat bangsa ini.⁶

Penulis setuju dengan Bhakti bahwa kita tidak boleh tinggal diam terhadap nasib bangsa ini. Karena itu, melalui artikel ini penulis akan memberikan pandangan tentang masalah ini dari sudut pandang kekristenan, khususnya dari Roma 13:1-7. Penulis akan membuktikan bahwa ketaatan merupakan wujud tanggung jawab moral yang tinggi kepada Allah selain merupakan kesadaran akan adanya murka Allah. Ketaatan itu harus dimiliki oleh para elite politik sebagai bagian dari warga negara (dalam hal ini ketaatan kepada pemerintah). Ketaatan dari setiap elite politik menunjukkan tanggung jawab moral yang baik. Jika demokrasi dikuasai oleh orang-orang demikian, pasti akan tercipta kehidupan demokrasi yang sehat dan menyejahterakan rakyat.

³UU MD3 ini mengubah cara penentuan ketua DPR dari partai pemenang pemilu menjadi *voting*, meniadakan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan mengerdikannya ke komisi-komisi, mengurangi peran DPD di dalam DPR, memberikan imunitas kepada anggota dewan yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara mengharuskan aparat hukum untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Kehormatan DPR sebelum menangkap koruptor di DPR tersebut.

⁴“Politik Malin Kundang,” *Kompas* 20 September 2014.

⁵Bhakti, “Demokrasi di Ujung Tanduk” 6.

⁶Bhakti menuliskan bahwa dalam sejarah Indonesia ada perbedaan kepentingan politik antara elite politik dan rakyat. Kaum elite lebih mendahulukan kepentingan diri dan kelompoknya, sementara rakyat lebih mendahulukan kepentingan bersama dan mendambakan seorang pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kesejahteraan dan keadilan sosial. Elite politik dapat bergabung dengan elite politik lain yang berbeda ideologinya, tetapi memiliki kepentingan politik dan ekonomi sesaat yang sama (*ibid.*).

Ketaatan kepada pemerintah merupakan kewajiban setiap warga negara. Pemerintah merupakan lembaga otoritas secara politik yang dibentuk oleh masyarakat melalui proses demokrasi untuk menjalankan fungsi berbangsa dan bernegara.⁷ Undang-undang dan segala perangkat peraturan dibuat oleh pemerintah bersama parlemen (para elite politik) dan ini tentunya untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Berbagai peraturan itu bersifat mengikat setiap orang yang ada di masyarakat dan ketaatan menjadi sebuah keniscayaan untuk mencapai tujuan baik dari peraturan-peraturan tersebut.⁸

Ketaatan menjadi indikator dan subjek ketaatan adalah manusia sendiri. Namun, natur manusia itu sendiri bersifat bebas (kehendak bebas) yang bertolak belakang dengan ketaatan dan keterikatan.⁹ Menurut John Locke, ketaatan menjadi sebuah konsekuensi logis terhadap kesepakatan atau persetujuan yang telah dibuat bersama oleh karena ada tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ia berpendapat bahwa ketaatan pada pemerintah terjadi karena adanya dorongan untuk mencapai kesejahteraan bersama, “*commonwealth*.”¹⁰ Lebih lanjut lagi, ketaatan pada pemerintah tercipta di dalam masyarakat karena adanya kebutuhan untuk mendapat kenyamanan dan kebebasan. Ketaatan ini lahir dari aspek hubungan antarsesama manusia yang saling membutuhkan.¹¹ Pandangan Locke ini telah memberikan pencerahan kepada banyak pemerintahan di dunia.¹²

⁷Di sini penulis memakai asumsi bahwa pemerintah yang tercipta adalah melalui proses demokrasi yang sehat. Penulis tidak membahas tentang subjek yang memerintah dengan zalim, diktator, atau korupnya sebuah pemerintahan dan kaitannya dengan masalah ketaatan.

⁸John Locke menjelaskan, “*For, when any number of men have, by the consent of every individual, made a community, they have thereby made that community one body, with a power to act as one body, which is only by the will and determination of the majority . . . one community, which the consent of every individual that united into it agreed that it should; and so every one is bound by that consent to be concluded by the majority*” (*Concerning Civil Government, Second Essay: An Essay Concerning the True Original Extent and End of Civil Government* [terj. William Popple; Pennsylvania: Pennsylvania State University, 1998] 54-55).

⁹Locke dengan tepat menyatakan, “*If man in the state of Nature be so free as has been said, if he be absolute lord of his own person and possessions, equal to the greatest and subject to nobody, why will he part with his freedom, this empire, and subject himself to the dominion and control of any other power?*” (ibid. 70-71).

¹⁰Locke menjelaskan, “*And thus every man, by consenting with others to make one body politic under one government, puts himself under an obligation to every one of that society to submit to the determination of the majority, and to be concluded by it*” (ibid. 55).

¹¹Locke juga menjelaskan, “*The great and chief end, therefore, of men uniting into commonwealths, and putting themselves under government, is the preservation of their property; to which in the state of Nature there are many things wanting*” (ibid. 71).

¹²Misalnya pada pemerintahan Amerika Serikat. Ross J. Corbett menjelaskan, “*John Locke illuminates the problem of crisis government and can exorcise certain pernicious prejudices regarding government, authority, and legitimacy*” (lih. “Locke and the Challenges of Crisis Government,” *The Good Society* 18/2 [2009] 24).

Bagaimana pandangan Rasul Paulus sendiri tentang ketaatan ini? Juga mengapa ketaatan menjadi langkah tepat untuk situasi yang sedang dihadapi bangsa ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab melalui studi Roma 13:1-7 dengan pendekatan analisis wacana. Hasil analisis ini adalah konsep teologis dan kaitannya dengan konteks permasalahan di atas yang akan disimpulkan pada bagian akhir artikel.

LANDASAN TEORI: ANALISIS *COLON*

Penulis memilih studi linguistik dengan pendekatan analisis wacana.¹³ Model analisis wacana yang digunakan adalah analisis *colon* (*colon analysis*) yang diperkenalkan oleh Johanes P. Louw.¹⁴ Mengapa penting membaca teks dengan analisis *colon*? Karena analisis *colon* menekankan semantik, di mana di dalamnya arti suatu bahasa melampaui arti kata, frasa, maupun kalimat. Wacana dalam bentuk paragraf mencakup dan mengatur struktur mikro teks. Louw menulis,

*When the pivot point of a paragraph has been determined it may then be seen how the author has built his sentences, phrases, and words around it. In determining the meaning of units such as words, one must not follow the popular traditional approach which uses etymology and a restricted sentence context, but rather the meanings must be derived from a study of the whole paragraph.*¹⁵

Analisis *colon* menekankan bahwa arti struktur mikro ditentukan oleh isi semantis struktur makro sehingga fokus penafsiran adalah menemukan isi semantis struktur makro. Arti struktur mikro seperti ketaatan kepada pemerintah ditentukan oleh teks makro Roma 13:1-7. Mark Edward Taylor menjelaskan,

The fundamental starting point and the most distinguishing doctrine of text-linguistics is that meaning in language occurs in units of text beyond the

¹³Tulisan ini adalah salah satu upaya untuk mengembangkan studi linguistik di dalam penafsiran teks Kitab Suci di Indonesia. Mark Edward Taylor menulis di dalam revisi disertasinya yang ditulis pada 2001, “*The entry of text-linguistics into biblical studies has been slow and is still in a developmental stage. Although several of the major tenets of text-linguistics may be traced to ancient rhetoric, dating from ancient Greece and Rome through the Middle Ages up to the present, the modern discussion is a distinctly twentieth-century movement*” (*A Text-Linguistic Investigation into the Discourse Structure of James* [New York: T&T Clark, 2006] 35-36).

¹⁴Lih. *Semantics of New Testament Greek* (Atlanta: Scholar, 1982).

¹⁵Ibid. 158.

*word and sentence level, units designated as “discourses.” This means that whereas traditional grammar has tended to focus on micro-structures such as phrases, clauses and sentences, the primary object of interpretive scrutiny for text-linguistics is the discourse as a whole. . . . This presupposes that a written text begins with an author’s formulation of an idea which is then expressed and developed by conscious language choices.*¹⁶

David Alan Black juga menjelaskan bahwa salah satu ciri khas analisis wacana adalah,

*Text linguistics concentrates on larger units of language such as paragraphs, sections, and entire texts (“macrostructures”). These larger textual units stand in a hierarchical and sequential relation to each other. Moreover, because macrostructures dominate the compositions and structure of texts, discourse is analyzed from the top down. This approach is enormously helpful in showing how the individual parts of a biblical book are related to the whole.*¹⁷

Studi ini juga fokus pada sintaksis. Black menyebutkan pendekatan analisis wacana diprioritaskan pada *text’s cohesion* dan *coherence*,

*Cohesion is a syntactic category and refers to the means of linking sentences into larger syntactical units. Coherence, on the other hand, is a semantic dimension of meaning and refers to the various ways in which readers make sense of a text. All of us expect a discourse (a sermon, for example) to be “coherent” in the sense of being relevant and clear. Both cohesion and coherence have a common concern in that they stress the need to see language as a dynamic interaction between speaker and listener or writer and reader.*¹⁸

Analisis *colon* adalah semacam analisis wacana yang menekankan pada penggunaan *colon*. Louw menyatakan, “*Discourse analysis based upon the use of colon is nothing more than a technique for mapping the form of a text in such a way that the syntactic relationships of the constituent parts can be most readily recognized.*”¹⁹ Sebuah *colon* dapat didefinisikan sebagai, “*A structural unit having a particular syntactic form and a related semantic content.*”²⁰

Di dalam analisis *colon* ada beberapa langkah yang akan diuraikan, yaitu *pertama*, membuat struktur *colon* (*syntactic structure*) dari setiap paragraf dan terjemahan literal. Pengelompokan kata akan terlihat di dalam struktur *colon*. *Kedua*, mencari isi semantis dari setiap *colon* atau kelompok (*cluster*)

¹⁶*A Text-Linguistic Investigation* 38-39.

¹⁷*Linguistics for Students of New Testament Greek* (Grand Rapids: Baker, 1995) 171.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Semantics of New Testament Greek* 95-96.

²⁰*Ibid.* 106, 107, 113.

colon dengan menganalisis kata, frasa, dan *colon*.²¹ Hasil analisis isi semantis ini adalah terjemahan dinamis atau *deep structure*. *Ketiga*, mencari hubungan semantis di antara *colon* atau kelompok *colon* di dalam satu paragraf yang sama. *Keempat*, menentukan tema atau ide utama (*the pivot point*) dari setiap paragraf.

ANALISIS COLON ROMA 13:1-7

Teks Roma 13:1-7 dimulai tanpa ada satu konjungsi (relasi) dengan teks sebelumnya (Rm. 12:9-21) dan ini mengindikasikan Rasul Paulus sedang membahas sebuah topik baru. Topik yang dibahas merupakan topik yang lebih spesifik dibandingkan topik pada teks sebelumnya.²² Namun, apakah topik baru ini berdiri sendiri atau masih berkaitan dengan topik pada teks sebelumnya? Uraian analisis *colon* berikut akan memberikan jawaban bahwa topik ini berkaitan dengan topik pada teks sebelumnya.²³

Struktur Colon

1 Πᾶσα ψυχὴ ὑποτασσέσθω ἐξουσίαις
↳ ὑπερεχούσαις.²⁴

□ A =
Perintah
utama

²¹Unit semantis dalam bentuk kata, frasa, dan klausa akan dianalisis dengan kategori semantis, pengelompokan kata (*grouping of words* atau *immediate constituents*), dan transformasi struktur luar (*surface structure*) ke struktur dalam (*deep structure*); tentang berbagai istilah ini lih. Louw, *Semantics of New Testament Greek* 65-89.

²²Konsep kasih di dalam kehidupan orang percaya menjadi topik atau ide utama di dalam teks sebelumnya (Roma 12:9-21) (lih. juga penjelasan Douglas J. Moo, *The Epistle to the Romans* [The New International Commentary on the New Testament; Grand Rapids: Eerdmans, 1996] 790-794, 769-790).

²³Moo, James D. G. Dunn, dan Joseph A. Fitzmyer melihat bahwa tidak ada situasi khusus dan ini merupakan topik yang berkesinambungan dengan teologi Paulus tentang kehidupan orang percaya di pasal sebelumnya dan sejalan dengan pengajaran PL (Moo, *The Epistle to the Romans* 790-794; Dunn, *Romans 9-16* [WBC; Dallas: Word, 2002] 758; Fitzmyer, *Romans* [The Anchor Yale Bible Commentary; London: Yale University Press, 2008] 662-665). Bdk. Thomas R. Schreiner yang melihat ada situasi khusus. Hal ini menyebabkan terjadinya keraguan atas keaslian teks (lih. *Romans* [Baker Exegetical Commentary on the New Testament; Grand Rapids: Baker, 1998] 677).

²⁴Teks ini oleh United Bible Societies (UBS) edisi ke-4 dikategorikan {A} sehingga teks itu secara yakin dikatakan asli. Teks ini didukung oleh beberapa kodeks seperti Sinaiticus, Alexandrinus, Vaticanus, Cambridge, dan Athos. Selain itu, banyak minuskul dan digunakan luas oleh bapa-bapa gereja seperti Origen, Acacius, Basil, Didymus, Chrysostom, Jerome, Pelagius, Agustinus, dan Speculum. Teks ini secara usia lebih tua dan distribusinya lebih luas dibandingkan dengan varian lain seperti *πάσαις ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθε* (P⁴⁶ D* F G it^{ar,b,d*,f,g,t} vg^{ms}) (eth) Iranaeus, Hippolytus; Tertulian, Ambrosiaster; Speculum; Cassiodorus; Seulius-Scotus); lih. juga pendapat Bruce M. Metzger, *A Textual Commentary on the Greek New Testament* (Stuttgart: German Bible Societies, 1994) 467.

2 γὰρ οὐ ἐξουσία ἔστιν
 ↳ εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ,

3 δὲ αἱ οὖσαι εἰσὶν τεταγμέναι
 ↳ ὑπὸ θεοῦ·

4 ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ ἀνθέστηκεν τῇ διαταγῇ
 ↳ τοῦ θεοῦ,

5 δὲ οἱ ἀνθεστηκότες λήμψονται κρίμα ἑαυτοῖς.

6 γὰρ οἱ ἄρχοντες εἰσὶν φόβος
 ↳ οὐκ τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ
 ↳ ἀλλὰ τῷ κακῷ.

7 δὲ θέλεις μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν·

8 ποιεῖ τὸ ἀγαθόν,

9 καὶ ἕξεις ἔπαινον
 ↳ ἐξ αὐτῆς·
 ↳ γὰρ ἔστιν διάκονός
 ↳ σοὶ ↳ θεοῦ
 ↳ εἰς τὸ ἀγαθόν.

10 δὲ φοβοῦ
 ↳ ἐὰν ποιῆς τὸ κακόν·
 ↳ γὰρ φορεῖ τὴν μάχαιραν
 ↳ οὐ εἰκῆ·
 ↳ γὰρ ἔστιν διάκονός
 ↳ θεοῦ
 ↳ ἕκδικος
 ↳ εἰς ὀργὴν
 ↳ τῷ πράσσει τὸ κακόν.

11 διὸ (ἔστιν) ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι,
 ↳ οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν
 ↳ ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν.

B =
 Alasan
 pertama

C =
 Konsekuensi
 logis/
 Penekanan
 perintah

D =
 Alasan
 kedua

E =
 Konsekuensi
 logis/
 Penekanan
 perintah

12 γὰρ τελεῖτε φόρους
 ↳ διὰ τοῦτο
 ↳ καὶ
 ↳ γὰρ εἰσὶν λειτουργοὶ
 ↳ θεοῦ
 ↳ προσκαρτεροῦντες εἰς αὐτὸ
 ↳ τοῦτο.

13 ἀπόδοτε τὰς ὀφειλάς
 ↳ πᾶσιν,

14 (ἀπόδοτε) τὸν φόρον
 ↳ τῷ (ὀφειλομένῳ) τὸν φόρον,

15 (ἀπόδοτε) τὸ τέλος
 ↳ τῷ (ὀφειλομένῳ) τὸ τέλος,

16 (ἀπόδοτε) τὸν φόβον
 ↳ τῷ (ὀφειλομένῳ) τὸν φόβον,

17 (ἀπόδοτε) τὴν τιμὴν
 ↳ τῷ (ὀφειλομένῳ) τὴν τιμὴν.

F =
Praktik
konkret

Terjemahan Literal

^{Ayat 1} 1. Setiap jiwa tunduklah kepada pemerintah-pemerintah yang mengontrol. 2. Sebab tidak ada pemerintah kecuali dari Allah, 3. dan pemerintah-pemerintah itu telah ditetapkan oleh Allah. ^{Ayat 2} 4. Sehingga, siapa pun yang menentang pemerintah menentang ketetapan Allah, 5. dan siapa pun yang melakukannya akan mendapat hukuman atas dirinya sendiri. ^{Ayat 3} 6. Sebab pemerintah-pemerintah itu bukan teror bagi dia yang berbuat baik melainkan yang berbuat jahat. 7. Inginkah kamu tidak takut terhadap pemerintah? 8. Lakukanlah perbuatan baik, 9. dan kamu akan mendapatkan pujian darinya; ^{Ayat 4} karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. 10. Tetapi takutlah jika kamu berbuat jahat karena bukan tanpa alasan pemerintah mengemban pedang karena pemerintah adalah hamba Allah yang membawa murka kepada dia yang berbuat jahat. ^{Ayat 5} 11. Sebab itu suatu keharusan untuk tunduk bukan hanya karena murka itu tetapi juga karena hati nurani. ^{Ayat 6} 12. Dengan alasan yang sama kamu juga membayar pajak karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang mengabdikan hidupnya untuk mengurus hal itu. ^{Ayat 7} 13. Bayarlah utangmu kepada setiap orang, 14. (bayarlah) pajak kepada

orang yang berhak menerimanya, 15. (bayarlah) cukai kepada orang yang berhak menerimanya, 16. (bayarlah) rasa takut kepada orang yang berhak menerimanya, 17. (bayarlah) hormat kepada orang yang berhak menerimanya.

Isi Semantis

Pada bagian ini penulis akan mencari isi semantis dari setiap *colon* atau kelompok (*cluster*) *colon* dengan menganalisis kata, frasa, dan *colon*. Hasil analisis isi semantis ini adalah terjemahan dinamis atau *deep structure*.

Colon 1

Objek ψυχή dijelaskan oleh abstrak πᾶσα membentuk sebuah frasa nomina sebagai pelaku dari peristiwa ὑπερεχούσαις. Frasa ini mengacu pada setiap orang baik orang percaya maupun orang tidak percaya.²⁵ Peristiwa ὑποτασέσθω merupakan perintah utama di dalam unit semantis ini. Kata ini muncul 6 kali (Rm. 8:7, 20; 10:3; 13:1, 5) dan dua di antaranya (Rm. 8:7; 10:3) digunakan untuk menunjukkan suatu ketaatan kepada hukum dan kebenaran Allah. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada otoritas di bumi sama pentingnya dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan yang dikehendaki adalah lebih dari sekadar “obey” tetapi “tunduk.” Ini adalah ketaatan yang sepenuhnya kepada otoritas yang di atasnya. Ada unsur hierarki dan relasi dengan yang di atas.²⁶ Objek ἐξουσία²⁷ di sini lebih tepat mengacu pada pemerintah-pemerintah sekular (sekelompok orang atau lembaga²⁸ yang memiliki otoritas untuk memerintah) karena berelasi secara sintaksis dengan peristiwa ὑποτασέσθω dan ὑπερεχούσαις. Peristiwa ὑπερεχούσαις²⁹ menjelaskan objek ἐξουσία. Peristiwa ini semakin mempertegas objek ἐξουσία sebagai penguasa yang memiliki otoritas dan superioritas yang harus ditaati oleh setiap orang.³⁰

²⁵Paulus juga menggunakannya di dalam Roma 2:9. Ini merupakan ungkapan *Semitic* yang menunjuk pada keutuhan seseorang bukan hanya tubuh atau roh. Bdk. dengan Dunn (*Romans 9-16* 760) dan Schreiner (*Romans* 682) yang menyatakan frasa ini hanya khusus ditujukan untuk orang percaya.

²⁶Lih. juga Fitzmyer, *Romans* 665.

²⁷J. P. Louw dan Eugene A. Nida mencatat beberapa arti yang muncul seperti *authority to rule* dan *jurisdiction* (lih. *Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains* [New York : United Bible societies, 1996] 146, 364, 472, 475, 680).

²⁸Diskusi tentang objek ini juga menyebut unsur spiritual seperti para malaikat termasuk di dalamnya, namun beberapa pakar telah menolaknya (lih. Dunn, *Romans 9-16* 760; Fitzmyer, *Romans* 665-667; Moo, *The Epistle to the Romans* 795-796; Schreiner, *Romans* 681-682).

²⁹Lih. Frederick W. Danker, rev. dan ed., *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature* (BDAG) (3rd ed.; Chicago: University of Chicago Press, 2000) 1033.

³⁰Pengertian superlatif lebih tepat daripada komparatif: penguasa yang lebih tinggi atau di atasnya (lih. Moo, *The Epistle to the Romans* 796-797).

Colon 2

Relasi γὰρ menunjukkan hubungan sebab dengan *colon* 1. Objek ἐξουσία memiliki referen yang sama dengan objek di *colon* 1, namun lebih menekankan pada unsur individu bukan lembaga.³¹ Abstrak οὐ mengindikasikan negatif terhadap objek ἐξουσία. Peristiwa ἔστιν menunjukkan eksistensi dari objek ἐξουσία. Relasi εἰ μὴ dan ὑπὸ menghubungkan objek ἐξουσία dengan objek θεοῦ: tidak ada keberadaan pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ini berarti setiap individu yang memiliki otoritas dan harus ditaati bersumber dari Allah. Relasi ὑπὸ menunjukkan sumber bahwa Allah menunjuk dan memberikan otoritas tersebut pada seseorang.³² Rasul Paulus menghubungkan otoritas pemerintah dan otoritas Allah. Allah berotoritas memberikan izin atau kuasa kepada seseorang untuk berkuasa dan memerintah. Menaati pemerintah sesungguhnya adalah menaati otoritas Allah karena pemerintah dengan segala otoritasnya berasal dari Dia.

Colon 3

Relasi δὲ menunjukkan alasan kedua selain *colon* 2. Peristiwa εἰσὶν kembali menegaskan eksistensi dari objek οἷσαι yang referen pada para pemerintah yang disebutkan pada *colon* 1 (abstrak αἱ menegaskan hal tersebut). Peristiwa τεταγμένοι³³ menjelaskan frasa nomina αἱ οἷσαι dan menyempurnakan arti eksistensi tersebut. Objek θεοῦ menjadi pelaku dari peristiwa τεταγμένοι dan relasi ὑπὸ menghubungkan objek θεοῦ dan peristiwa τεταγμένοι. Relasi ini menunjukkan sumber seperti *colon* 2 bahwa Allah menetapkan para pemerintah yang eksis. Ini melengkapi *colon* 2 bahwa selain Allah memberikan izin atau otoritas kepada setiap pemerintah, Ia juga mengesahkan otoritas tersebut. Ini menegaskan bahwa setiap pemerintah di dunia dengan segala otoritasnya diberikan dan disahkan oleh Allah.³⁴

Colon 4

Relasi ὡστε menghubungkan *colon* 4-5 dengan *colon* 2-3 sebagai hubungan konsekuensi logis “sehingga, sebagai hasilnya.”³⁵ Peristiwa ἀντιτασσόμενος

³¹Lih. juga ibid. 798.

³²Alasan ini tidak unik bagi Rasul Paulus karena bersumber dari pengajaran Perjanjian Lama (lih. juga Dunn, *Romans 9-16* 761; Fitzmyer, *Romans* 667).

³³Kata ini berarti “to appoint, to designate, to assign, to give a task to” (lih. Louw dan Nida, *Greek-English Lexicon* 482). Kata ini hanya muncul sekali di dalam surat Roma.

³⁴Dengan kata lain, Allah menunjuk dan menetapkan otoritas dan lembaga pemerintah tersebut (lih. juga Moo, *The Epistle to the Romans* 798).

³⁵Fitzmyer dengan baik menjelaskan, “Submission to civil authorities is a form of obedience to God himself, for the relationship of humans to God is not limited to the religious

dan ἀνθέστηκεν adalah kontras dengan peristiwa ὑποτασσέσθω.³⁶ Objek ὁ merupakan pelaku dari peristiwa ἀντιτασσόμενος. Objek ἐξουσία memiliki referen yang sama dengan *colon 2*. Peristiwa διαταγῆ dengan penjelasan abstrak τῆ merupakan peristiwa yang sama dengan τεταγμένα di *colon 3*.³⁷ Jika *colon 1* merupakan perintah utama yang positif, *colon 4-5* merupakan perintah yang negatif dan menegaskan perintah utama tersebut.

Colon 5

Relasi δε merupakan kelanjutan ide dari *colon 4*. Peristiwa ἀνθεστηκότες diulang kembali dan menunjuk peristiwa yang sama di *colon 4*.³⁸ Peristiwa λήμψονται dan κρίμα menjelaskan bahwa mereka akan menerima hukuman yang Allah berikan pada saat eskatologis atau masa penghakiman nantinya.³⁹ Objek ἑαυτοῖς merupakan penekanan pada objek οἱ. *Colon 4-5* merupakan konsekuensi logis dari *colon 2-3* dan sekaligus penekanan kembali pada perintah utama di *colon 1*, yakni menaati sepenuhnya setiap pemerintah di dunia.

Colon 6

Relasi γὰρ menghubungkan *colon 6-10* dengan *colon 1* di atas. *Colon 6-10* menjelaskan sebab atau alasan dari perintah utama di *colon 1*. Pemerintah dengan segala otoritasnya ditetapkan oleh Allah sehingga pemerintah berotoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan damai. Ini menjadi alasan kedua dari ketaatan kepada pemerintah. Objek ἄρχοντες memiliki referen yang sama dengan objek ἐξουσίας dan lebih spesifik menunjuk pada pemerintah sekular di dunia.⁴⁰ Peristiwa εἶσιν dijelaskan oleh 2 abstrak οὐκ dan φόβος. Abstrak οὐκ memberikan unsur negatif. Abstrak φόβος lebih tepat dalam pengertian kausatif terhadap objek ἄρχοντες.⁴¹ Peristiwa ἔργα dijelaskan oleh dua abstrak yang saling kontras yaitu ἀγαθῶ dan κακῶ. Kedua abstrak ini berkaitan dengan pemerintah sehingga menunjukkan

or cultic sphere of life. Hence even Christians, 'freed' by Christ Jesus from the powers of this world, cannot resist the political authority that comes ultimately from God, even if that authority is at the time in the hands of heathens" (Romans 667).

³⁶Kedua kata peristiwa ini berarti tindakan resistensi atau menentang otoritas atau kekuasaan yang ada (lih. juga Roma 9:19 dan BDAG 80, 90).

³⁷Lih. Moo, *The Epistle to the Romans* 799.

³⁸Lih. ibid.

³⁹λήμψονται κρίμα merupakan ungkapan semitisme yang bersifat eskatologis (lih. Dunn, *Romans 9-16* 762; Moo, *The Epistle to the Romans* 799; Fitzmyer, *Romans* 667).

⁴⁰Lih. juga Fitzmyer, *Romans* 667.

⁴¹Lih. BDAG 1062. Penulis setuju dengan pendapat Schreiner bahwa ini adalah ketakutan pada hukuman yang diberikan oleh pemerintah (lih. *Romans* 683, juga Moo, *The Epistle to the Romans* 800).

perbuatan-perbuatan moral (baik dan jahat) yang sesuai atau bertentangan dengan hukum atau peraturan pemerintah.⁴² Pemerintah yang ada bukanlah penyebab ketakutan bagi mereka yang menaati hukum, melainkan mereka yang melanggar hukum tersebut.

Colon 7

Relasi $\delta\epsilon$ menghubungkan ide yang sama dengan *colon* 6. Peristiwa $\theta\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\iota\varsigma$ menanyakan keinginan yang dijelaskan lebih lanjut oleh peristiwa $\varphi\omicron\beta\epsilon\iota\theta\alpha\iota$. Peristiwa $\varphi\omicron\beta\epsilon\iota\theta\alpha\iota$ dengan keterangan negatif dari abstrak $\mu\grave{\eta}$ merupakan peristiwa yang sama dengan peristiwa $\varphi\acute{\omicron}\beta\omicron\varsigma$ di *colon* 6. Objek $\acute{\epsilon}\xi\omicron\upsilon\sigma\iota\alpha\nu$ dengan keterangan abstrak $\tau\grave{\eta}\nu$ memiliki referen yang sama dengan objek $\acute{\epsilon}\xi\omicron\upsilon\sigma\iota\alpha$ di atas.

Colon 8

$\pi\omicron\iota\epsilon\iota$ τὸ ἀγαθὸν “lakukanlah perbuatan baik” dengan abstrak ἀγαθὸν yang menjelaskan peristiwa $\pi\omicron\iota\epsilon\iota$. Abstrak ini memiliki referen yang sama dengan abstrak di *colon* 6.

Colon 9

Relasi $\kappa\alpha\iota$ menghubungkan kelanjutan ide dengan *colon* 8. Peristiwa $\acute{\epsilon}\xi\epsilon\iota\varsigma$ mengindikasikan ada *benefit* ke depan yang akan mereka dapatkan. Peristiwa $\acute{\epsilon}\pi\alpha\iota\nu\omicron\nu$ melengkapi peristiwa $\acute{\epsilon}\xi\epsilon\iota\varsigma$. Pemerintah⁴³ akan memuji mereka yang menaati hukum.⁴⁴ Relasi $\gamma\acute{\alpha}\rho$ menjelaskan alasan dari peristiwa $\acute{\epsilon}\pi\alpha\iota\nu\omicron\nu$. Peristiwa $\delta\iota\acute{\alpha}\kappa\omicron\nu\omicron\varsigma$ menjelaskan bahwa pemerintah melayani Allah di dunia ini.⁴⁵ Abstrak ἀγαθὸν dengan relasi $\epsilon\iota\varsigma$ menjelaskan tujuan pemerintah melayani Allah, yakni menciptakan kehidupan tertib dan damai⁴⁶ di dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷ Pujian akan diberikan kepada mereka jika mereka hidup sesuai dengan hukum pemerintah dan hal ini berarti mereka ikut terlibat

⁴²Walaupun demikian, di dalam surat ini Rasul Paulus banyak menggunakan istilah “baik” dan “jahat” yang menunjukkan perbuatan moral yang sesuai dengan hukum atau kebenaran Allah (1:30; 2:7, 9, 10; 7:12, 13, 18, 19, 21; 8:28; 9:11; 12:2, 9, 17, 21; 16:19) (lih. juga Fitzmyer, *Romans* 667; bdk. Dunn, *Romans 9-16* 763).

⁴³Objek $\alpha\upsilon\tau\eta\varsigma$ memiliki referen pada pemerintah, bukan Allah.

⁴⁴Ini menjadi semacam *benefit* yang Allah berikan melalui pemerintah. Lih. juga Roma 2:29 yang menyatakan pujian bersumber dari Allah karena keyahudiannya (lih. juga Moo, *The Epistle to the Romans* 800).

⁴⁵Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa pemerintah adalah ketetapan Allah seperti di *colon* 2-3 (lih. juga Fitzmyer, *Romans* 668).

⁴⁶Lih. juga penjelasan Dunn, *Romans 9-16* 764 (bdk. Moo, *The Epistle to the Romans* 801).

⁴⁷Objek $\sigma\omicron\iota$ mengacu pada ia yang melakukan perbuatan baik di *colon* 8.

di dalam tujuan pemerintah. Sebab itu, ketaatan kepada pemerintah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara.

Colon 10

Relasi δὲ menghubungkan *colon* ini dengan colon 9 dalam hubungan kontras. *Colon 9* memiliki ide positif, sebaliknya colon 10 adalah ide negatif. Peristiwa φοβοῦ sama dengan abstrak φόβος di *colon 6*, begitu juga dengan peristiwa ποιῆς yang dijelaskan oleh abstrak τὸ κακὸν menunjukkan suatu perintah untuk takut mendapat hukuman dari pemerintah jika melanggar peraturan atau hukum pemerintah.⁴⁸ Relasi γὰρ menjelaskan alasan peristiwa φοβοῦ. Peristiwa φορεῖ menjelaskan bahwa pemerintah mengemban sesuatu⁴⁹ yang dijelaskan lebih lanjut oleh 2 abstrak οὐ dan εἰκῆ, dan peristiwa μάχαιραν. Abstrak οὐ εἰκῆ mempertegas adanya tujuan dari peristiwa φορεῖ.⁵⁰ Peristiwa μάχαιραν⁵¹ menjelaskan bahwa pemerintah mengemban otoritas untuk memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar hukum pemerintah. Selanjutnya, relasi γὰρ menghubungkan peristiwa φορεῖ μάχαιραν dengan peristiwa ἐστὶν secara sebab akibat. Peristiwa ἐστὶν sama dengan peristiwa ἐστὶν di colon 9, begitu juga dengan peristiwa διάκονός yang diikuti oleh objek θεοῦ.⁵² Pemerintah ditetapkan oleh Allah dan melayani Allah sehingga Allah memberikan otoritas untuk mengatur kehidupan secara tertib dan damai (τὸ ἀγαθόν; positif) dan memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar hukum pemerintah (τὴν μάχαιραν φορεῖ; negatif). Aspek negatif ini dijelaskan lebih lanjut dalam peristiwa ἔκδικος yang menjelaskan pemerintah sebagai instrumen Allah dalam memberikan hukuman.⁵³ Hukuman ini dijelaskan lebih spesifik dalam peristiwa ὀργὴν yang diikuti oleh relasi εἰς. Relasi ini menghubungkan peristiwa ἔκδικος dengan peristiwa ὀργὴν. Pemerintah menjadi instrumen Allah, yaitu pembawa murka atau kemarahan Allah.⁵⁴ Peristiwa πᾶσσοντι dengan abstrak τὸ κακὸν dan objek τῷ menunjuk peristiwa yang sama dengan peristiwa ποιῆς di atas. Jadi, hukuman di sini jelas adalah Allah murka kepada seseorang yang melanggar atau melawan pemerintah.

Colon 6-10 memberikan alasan kedua terhadap *colon 1*. Rasul Paulus menjelaskan bahwa alasan ketaatan kepada pemerintah adalah karena

⁴⁸Lih. juga Dunn, *Romans 9-16* 764.

⁴⁹BDAG 1064.

⁵⁰Lih. ibid. 281.

⁵¹Lih. juga Fitzmyer *Romans*, 668; Moo, *The Epistle to the Romans* 801; Schreiner berpendapat ini merupakan fungsi hukum yang diberikan (*Romans* 684).

⁵²Lih. penjelasan *colon 9* di atas.

⁵³BDAG 301, begitu juga para penafsir seperti Moo, Fitzmyer, Dunn, dan Schreiner.

⁵⁴Para penafsir seperti Moo, Fitzmyer, dan Dunn menyetujui murka di sini menunjuk pada murka Allah; bdk. dengan Schreiner yang melihat ini sebagai murka pemerintah (*Romans* 685).

pemerintah melayani Allah sehingga Allah memberikan otoritas kepada pemerintah untuk mengatur kehidupan secara tertib dan damai dan membawa hukuman kepada mereka yang melanggar hukum pemerintah.

Colon 11

Colon 11 merupakan konsekuensi logis dari *colon* 6-10 dan sekaligus penekanan kembali terhadap perintah utama di *colon* 1. Relasi διὸ⁵⁵ menjelaskan konsekuensi logis terhadap *colon* 6-10 dan sekaligus menekankan kembali perintah utama di *colon* 1. Peristiwa ὑποτάσσεσθαι di sini sama dengan peristiwa ὑποτασσέσθω di *colon* 1, cuma di sini ditambah penjelasan abstrak ἀνάγκη. Setelah Rasul Paulus menjelaskan *colon* 6-10, ia menyimpulkan bahwa ketaatan sepenuhnya kepada pemerintah merupakan hal yang seharusnya *necessity* terjadi seperti hukum alam.⁵⁶ Ada dua relasi διὰ yang menjelaskan alasan terhadap ὑποτάσσεσθαι ini. *Pertama*, peristiwa ὀργὴν dengan abstrak τὴν yang menunjukkan peristiwa yang sama dengan peristiwa ὀργὴν di *colon* 10. *Kedua*, peristiwa συνείδησιν menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hati nurani, “*conscience*,” akan tanggung jawab moralnya untuk melakukan apa yang baik.⁵⁷ Rasul Paulus menekankan bahwa ketaatan sepenuhnya kepada pemerintah haruslah didasari oleh tanggung jawab moral setiap warga negara. Hati nurani ini dimiliki oleh setiap orang sehingga ketaatan itu seharusnya terjadi selain karena alasan mengantisipasi hukuman dari Allah.

Colon 12

Relasi διὰ dengan abstrak τοῦτο menghubungkan *colon* 12 dengan *colon* 2-10. *Colon* 2-10 menekankan dua alasan ketaatan kepada pemerintah: pemerintah ditetapkan oleh Allah dan melayani Allah. Relasi διὰ τοῦτο menunjuk pada kedua alasan tersebut.⁵⁸ Peristiwa τελεῖτε dengan relasi διὰ τοῦτο γὰρ⁵⁹ dan objek φόρου⁶⁰ bukan mengindikasikan perintah, melainkan

⁵⁵Lih. Louw dan Nida, *Greek-English Lexicon* 782.

⁵⁶Lih. *ibid.* 671; Dunn, *Romans 9-16* 765.

⁵⁷Lih. juga Roma 2:15; Schreiner, *Romans* 685; Dunn, *Romans 9-16* 765; Fitzmyer, *Romans* 669.

⁵⁸Lih. juga Schreiner, *Romans* 685; bdk. Moo yang menunjuk pada *colon* 12 untuk mempertahankan kesadaran (*The Epistle to the Romans* 803-804).

⁵⁹Hal ini hanya ditemukan di bagian ini di dalam surat-surat Paulus.

⁶⁰Dunn menyatakan, “*The distinction between φόρος and τέλος (v 7) corresponds to the difference between tributum (direct taxes from which Roman citizens would have been exempt in Rome) and vectigalia (direct taxes comprised initially of revenue from rents on state property but in Paul’s time also including customs duty, tax on slave sales and manumissions, death duties)*” (*Romans 9-16* 766; lih. juga Schreiner, *Romans* 686).

suatu peristiwa kebiasaan atau kebiasaan membayar pajak.⁶¹ Relasi γὰρ memberikan justifikasi lebih lanjut dari peristiwa τελείτε φόρους. Peristiwa εἰσιν kembali menegaskan bahwa pemerintah ada seperti peristiwa ἐστὶν di *colon* 9 dan 10. Peristiwa ini dilengkapi dengan peristiwa λειτουργοὶ⁶² dengan objek θεοῦ. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah merupakan bagian dari pelayanan-pelayanan publik yang Allah tetapkan dan menunjukkan referen yang sama dengan *colon* 9 dan 10. Peristiwa προσκατεροῦντες⁶³ menjelaskan lebih lanjut tentang peristiwa εἰσιν. Pemerintah selain melayani publik juga mengabdikan hidup untuk mereka. Relasi εἰς menghubungkan peristiwa προσκατεροῦντες dengan objek αὐτὸ τοῦτο. Pemerintah mengabdikan hidupnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah publik, seperti mengatur kehidupan yang tertib dan damai, memberi hukuman, dan mengumpulkan pajak dari masyarakat.⁶⁴

Colon 13-17

Peristiwa utama adalah ἀπόδοτε.⁶⁵ Peristiwa ini sama dengan τελείτε, hanya dalam bentuk imperatif. Objek ὀφειλᾶς menunjuk pada kewajiban keuangan yang harus dibayarkan atau *financial debt*.⁶⁶ Objek φόρον referen sama dengan *colon* 12 di atas. Objek τέλος menunjuk pada pajak tidak langsung seperti cukai.⁶⁷ Peristiwa φόβον “*respect*” dan τιμὴν “*honor*” di sini menunjukkan sikap hormat kepada seseorang yang lebih tinggi di dalam tingkatan sosial.⁶⁸

Colon 12-17 menekankan pada pembayaran pajak kepada pemerintah. Pembayaran pajak ini atas dasar *colon* 2-10 yang menekankan dua alasan ketaatan kepada pemerintah: pemerintah ditetapkan oleh Allah dan melayani Allah. Praktik atau langkah konkret yang diperintahkan Paulus adalah membayar pajak dan menghormati pemerintah. Membayar pajak dan menghormati pemerintah merupakan wujud ketaatan kepada pemerintah selain perbuatan baik yang menaati hukum pemerintah.

⁶¹Moo, Fitzmyer, dan Dunn melihat ini sebagai indikatif, bukan imperatif; bdk. dengan Schreiner yang melihat ini adalah imperatif; lih. juga penjelasan Dunn, *Romans 9-16* 766.

⁶²Lih. BDAG 591. Di sini, Rasul Paulus menggunakan istilah lain dari διάκονός (lih. juga Rm. 15:16; Moo, *The Epistle to the Romans* 804).

⁶³Lih. juga Roma 12:12. BDAG menjelaskan makna kata ini adalah: “*busy oneself with, be busily engaged in, be devoted to*” (h. 881).

⁶⁴Moo dan Schreiner menyetujui pandangan ini. Bdk. Fitzmyer dan Dunn yang terbatas pada hal pengumpulan pajak.

⁶⁵BDAG menjelaskan makna kata ini: “*to meet a contractual or other obligation, pay, pay out, fulfill, of fulfilling various responsibilities*” (h. 109; penekanan oleh penulis).

⁶⁶BDAG 743; Moo, *The Epistle to the Romans* 805.

⁶⁷Lih. penjelasan di atas (BDAG 999). Hal ini mengingatkan perkataan Yesus dalam Markus 12:17.

⁶⁸BDAG 1062, 1005. Fitzmyer menjelaskan bahwa φόβον lebih tinggi dibandingkan dengan τιμὴν (*Romans* 670). Penulis melihat ini adalah sinonim dekat yang menunjukkan penekanan, bukan perbedaan yang tajam di antara dua peristiwa tersebut.

Terjemahan Deep Structure

Colon 1-17 dapat diterjemahkan menjadi “Setiap orang harus menaati pemerintah-pemerintah dengan sepenuhnya. Mereka adalah para penguasa yang memiliki otoritas dan superioritas atas setiap orang. Karena Allah memberikan izin kepada setiap pemerintah untuk berkuasa dan Allah mengesahkan para pemerintah tersebut. Sehingga siapa pun yang menentang pemerintah menentang apa yang Allah telah tetapkan. Dan siapa pun yang melakukannya dirinya sendiri akan menerima hukuman yang Allah berikan pada saat penghakiman nanti. Tidak inginkah kamu hidup bebas dari hukuman pemerintah? Hiduplah sesuai dengan aturan hukum atau peraturan pemerintah. Dan pemerintah akan memuji kamu karena kamu ikut terlibat di dalam tujuan pemerintah melayani Allah, yakni menciptakan kehidupan yang tertib dan damai di dalam masyarakat. Namun, takutlah jika kamu melanggar hukum pemerintah karena pemerintah mengemban otoritas untuk memberikan hukuman sebab dia melayani Allah sehingga diberi otoritas untuk membawa hukuman itu, yakni murka Allah kepada siapa saja yang melanggar atau melawan pemerintah. Sebab itu, sudah seharusnya setiap orang menaati sepenuhnya kepada pemerintah karena setiap orang memiliki tanggung jawab moral yang baik selain karena adanya hukuman, yakni murka Allah. Berdasarkan alasan-alasan di atas, kamu juga membayar pajak kepada pemerintah yang merupakan pelayan-pelayan publik yang Allah tetapkan. Mereka adalah pelayan yang mengabdikan hidupnya untuk melayani publik. Bayarlah utangmu, pajakmu baik langsung maupun tidak langsung, dan hormatilah orang-orang yang lebih tinggi darimu.”

Hubungan Semantis dan Ide Utama

Teks Roma 13:1-7 sebagai satu unit semantis terdiri atas 17 *colon* dan dibagi menjadi 6 kelompok atau *cluster colon*. *Colon* 1 sebagai perintah utama, yakni ketaatan sepenuhnya kepada pemerintah, dijelaskan oleh *colon* 2-17. *Colon* 2-3 merupakan alasan pertama dari *colon* 1. *Colon* 4-5 merupakan konsekuensi logis dari *colon* 2-3 dan sekaligus penekanan kembali pada perintah utama di *colon* 1. *Colon* 6-10 memberikan alasan kedua terhadap *colon* 1. *Colon* 11 merupakan konsekuensi logis dari *colon* 6-10 dan sekaligus penekanan kembali terhadap perintah utama di *colon* 1. *Colon* 12-17 merupakan praktik atau langkah konkret yang nyata terhadap *colon* 1. Ide utama *colon* 1-17 adalah ketaatan sepenuhnya kepada pemerintah.

KONSEP TEOLOGIS

Analisis *colon* di atas menghasilkan tema wacana, yakni ketaatan sepenuhnya kepada pemerintah. Ada dua landasan atau alasan utama di balik ketaatan kepada pemerintah. *Pertama*, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah memberikan izin kepada setiap pemerintah untuk berkuasa dan Allah mengesahkan para pemerintah tersebut. *Kedua*, Rasul Paulus menjelaskan bahwa pemerintah melayani Allah sehingga Allah memberikan otoritas kepada pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan damai dan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggar hukum atau peraturan sehingga mengganggu kehidupan masyarakat.

Tema ini semakin penting karena mendapat dua penekanan dan satu aplikasi konkret. *Pertama*, siapa pun yang menentang pemerintah berarti menentang apa yang Allah telah tetapkan. Siapa pun yang menentang akan menerima hukuman dari Allah pada saat penghakiman nanti. *Kedua*, setiap orang sudah seharusnya menaati pemerintah karena setiap orang memiliki tanggung jawab moral yang baik selain karena adanya hukuman, yakni murka Allah. Ketaatan ini juga disempurnakan oleh Rasul Paulus dengan satu langkah konkret, yakni membayar pajak dan menghormati pemerintah.

Rasul Paulus berpandangan bahwa ketaatan pada pemerintah merupakan wujud menaati Allah karena pemerintah merupakan wakil Allah di dunia untuk mengatur kehidupan secara tertib dan damai. Penulis menemukan bahwa Rasul Paulus menekankan dua aspek di dalam ketaatan pada pemerintah. *Pertama*, aspek horizontal dengan sesama. Ketaatan merupakan keniscayaan karena pemerintah merupakan lembaga otoritas yang dibentuk atas satu tujuan bersama, yakni untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan damai. *Ketaatan menjadi kunci untuk mencapai kehidupan yang tertib dan damai.*⁶⁹ Rasul Paulus juga menekankan unsur penghukuman kepada setiap warga yang tidak taat pada peraturan atau hukum di masyarakat dan memberikan perlindungan kepada mereka yang taat. Hal ini adalah sisi hukum yang dimiliki oleh pemerintah dan ini ditegaskan Rasul Paulus. *Kedua*, aspek vertikal dengan Allah. Secara spiritual ini memberikan filosofi ketaatan itu. Hati nurani akan tanggung jawab moral mendapat penekanan di sini dan hal itu dimiliki oleh setiap orang. Hati nurani demikian bersumber dari Allah dan ada di dalam hati setiap orang.⁷⁰ Bagi Rasul Paulus, ketaatan yang didasarkan oleh tanggung jawab moral merupakan kehendak Allah. Allah menghendaki setiap orang taat baik kepada pemerintah maupun kepada Dia atas dasar tanggung jawab

⁶⁹Ada kemiripan pandangan Rasul Paulus dengan pandangan Locke bahwa ketaatan pada pemerintah karena adanya dorongan untuk mencapai sebuah keadaan *commonwealth*.

⁷⁰Lih. pembahasan *colon* 11 di atas.

tersebut. Jadi, ketaatan di sini memiliki sisi spiritual karena bagi Rasul Paulus ketaatan kepada pemerintah berarti ketaatan kepada Allah.⁷¹

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis *colon* Roma 13:1-7 dan konsep teologis di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa poin berikut ini. Pemerintah adalah hamba Allah yang diberi otoritas untuk menjalankan segala fungsinya demi terciptanya masyarakat yang tertib dan damai. Termasuk di dalamnya adalah menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat dan mengutamakan rakyat, bukan pihak atau kelompok tertentu. Untuk menjalankan hal tersebut, pemerintah membuat sejumlah peraturan atau hukum. Ketaatan pada peraturan-peraturan atas dasar hati nurani akan tanggung jawab moral menjadi penting untuk menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat. Ketaatan menjadi indikator untuk mengukur tanggung jawab moral setiap warga negara termasuk para elite politik. Mereka yang menjadi elite politik haruslah warga negara yang memiliki tanggung jawab moral yang tinggi (selain kesadaran akan adanya murka atau hukuman Allah kelak). Ketaatan pada peraturan-peraturan yang ditunjukkan oleh setiap elite politik akan menunjukkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral yang baik. Jika demokrasi dikuasai oleh orang-orang demikian, kehidupan demokrasi di Indonesia akan sehat dan menyejahterakan rakyat. Demokrasi ini akan melahirkan para pemimpin yang mengutamakan rakyat. Jadi, hati nurani akan tanggung jawab moral merupakan esensi penting yang tidak boleh diabaikan jika negeri ini ingin menciptakan suatu demokrasi yang menyejahterakan rakyat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Black, David Alan. *Linguistics for Students of New Testament Greek*. Grand Rapids: Baker, 1995.
- Corbett, Ross J. "Locke and the Challenges of Crisis Government." *The Good Society* 18/2 (2009): 20-25.
- Danker, Frederick W., rev. dan ed. *Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*. Third Edition. Chicago: University of Chicago Press, 2000.

⁷¹Di sini terlihat perbedaan pandangan Rasul Paulus dengan Locke. Locke tidak melihat unsur tersebut karena dianggap secara alami/natural tercipta di dalam masyarakat.

Dunn, James D. G. *Romans 9-16*. WBC. Dallas: Word, 2002.

Fitzmyer, Joseph A. *Romans*. The Anchor Yale Bible Commentary. London: Yale University Press, 2008.

Locke, John. *Concerning Civil Government, Second Essay: An Essay Concerning the True Original Extent and End of Civil Government*. Terj. William Popple. Pennsylvania: Pennsylvania State University, 1998.

Louw, Johanes P. dan Eugene A. Nida, *Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains*. New York: United Bible Societies, 1996.

Louw, Johanes P. *Semantics of New Testament Greek*. Atlanta: Scholar, 1982.

Metzger, Bruce M. *A Textual Commentary on the Greek New Testament*. Stuttgart: German Bible Societies, 1994.

Moo, Douglas J. *The Epistle to the Romans*. The New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1996.

Schreiner, Thomas R. *Romans*. Baker Exegetical Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Baker, 1998.

Taylor, Mark Edward. *A Text-Linguistic Investigation into the Discourse Structure of James*. New York: T&T Clark, 2006.